

Al-Khairiyah Banten: Manajemen Pendidikan Islam di Era Modernisasi Pesantren

Mustofa,¹ An An Andari,² Elis Solihati,³ Diana Livia,⁴ Ilma Sripa Nurmila⁵

^{1,2}Universitas Islam An Nur Lampung

^{3,4}STISA Ash Shofa Manonjaya Tasikmalaya

⁵Universitas Galuh Ciamis

*Korespodensi: *elissolihati@upi.edu*

ABSTRAK

Perkembangan Pendidikan Islam yang pesat di abad ini tidak terlepas dari historis yang Panjang dan penuh tantangan. Lembaga dengan manajemen kuat yang mampu bertahan hingga saat ini, salah satunya adalah Al-Khairiyah yang sudah berdiri lebih dari 1 abad. Paper ini akan mengkaji historis, manajemen pendidikan, dan ciri khas Lembaga Pendidikan Al-Khairiyah. Peneliti menggunakan studi deskriptif kualitatif, dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan Langkah pengumpulan data, kategorisasi data, dan menjelaskan data. Al-Khairiyah menjadi Lembaga Pendidikan Islam dengan manajemen yang kuat, terbesar dan tertua di daerah Banten, serta menjadi pusat jaringan madrasah. Al-Khairiyah memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, sehingga tahun 1929 dibentuk cabang-cabang madrasah guna memperkuat manajemen dan keberlangsungan Al-Khairiyah meskipun pendirinya sudah tidak ada.

Kata kunci: Al Khairiyah Banten, Manajemen Pendidikan Islam

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia akhir-akhir decade ini sangat pesat, meskipun memang sudah dikenal jauh sebelum Indonesia Merdeka (Alfurqan 2019). Data Satu Data Kementerian Agama RI menunjukkan terdapat 1506 Roudhotul Athfal, 1116 MI, 1119 MTs, 467 MA, 5344 unit pondok pesantren di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa adanya proses kemajuan segi social keagamaan setiap warga di Banten. Dari sekian banyak Lembaga di Banten, banyak yang tidak sanggup bertahan dan bubar. Hal ini menyiratkan bahwa hanya Lembaga dengan pengelolaan yang tepat dan kuat yang bisa bertahan.

Berdasarkan Sejarah, Pendidikan Indonesia didominasi oleh colonial Belanda (Ruslan 2020), sehingga berpengaruh pada berbagai kebijakan yang dijalankan. Perkembangan dunia pesantren di wilayah Banten mendorong perubahan di bidang Pendidikan dan keagamaan yang semula bersifat tradisional menjadi bersifat modern Islam. Sekolah model Belanda diberi penguatan pengajaran Islam, mengadopsi substansi sistem Pendidikan Belanda. Maka pengembangan ini didirikan sekolah dan madrasah. Hal ini tidak menyurutkan KH. Syam'un dalam memperbaiki kondisi Masyarakat Banten yang 'poek mangkelong' atau gelap gulita dari segi pemahaman ilmu agama. Beliau mendirikan Pesantren Citangkil yang merupakan cikal bakal Madrasah Al-Khairiyah (Anggrayani 2021). Al-Khairiyah merupakan produk pembaharuan dan modernisasi pesantren di Banten sebagai penyeimbang Pemerintah Belanda di Wilayah Cilegon pada saat itu (Wiryono 2012), berdiri tanggal 5 Mei 1916 Masehi atau 12 Syawal 1343 Hijriyah. Terhitung lebih dari 1 abad usia Al Khairiyah.

Banyak penelitian yang berkaitan dengan modernisasi Pendidikan Islam, di antaranya: Karo (2020) membahas modernisasi Islam di Mesir yang sangat berdampak pada kemajuan peradaban Islam, hal ini memainkan peran penting dan strategis dalam peradaban modernisasi Pendidikan di Indonesia (Murtadlo 2018). Sinaga (2020) membahas terkait landasan teologis, filosofis, dan historis moderenisasi Pendidikan Islam, hasil penelitiannya menegaskan bahwa modernisasi Pendidikan Islam itu hukumnya wajib untuk peningkatan mutu dan kualitas sesuai perkembangan zaman. Hal tersebut merupakan keniscayaan Sejarah yang direkomendasikan Wahid (2022). Ada juga berkaitan dengan mengkaji Pesantren Al-Khairiyah diantaranya; Anggrayani (2021) yang mengkaji modernisasi pendidikan Islam di Banten dengan membahas Peran KH. Syam'un dalam membangun pesantren Al-Khairiyah Citangkil Cilegon dari rentang 1916-1942 melalui metode penulisan sejarah. Namun, masih sangat jarang yang membahas terkait dengan manajemen Pendidikan

Al-Khairiyah Banten dan ciri khas Lembaga yang mampu menguatkannya di era saat ini. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas manajemen Pendidikan Islam Lembaga Al-Khairiyah Banten di era modernisasi Pendidikan Islam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Historis dan Modernisasi Pesantren di Banten

Pembaruan di dunia pesantren di Indonesia berkembang pesat sejak permulaan abad ke-20. Terjadinya pembaruan pesantren merupakan perwujudan sikap reaktif pesantren terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan. Eksistensi pesantren sebagai lembaga tradisonal Islam telah menimbulkan semacam anti-tesis dengan munculnya lembaga pendidikan modern Islam yang berkembang seiring dengan munculnya gerakan reformis muslim (tajdid).

Kaum reformis atau modernis muslim (Mujaddid) khususnya yang bergerak di bidang pendidikan, yang menemukan momentumnya sejak awal abad ke-20, berpendapat bahwa diperlukan informasi sistem pendidikan Islam agar mampu menjawab tentang colonialism dan ekspansi Kristen. Dalam konteks inilah, muncul kemudian dua bentuk lembaga pendidikan modern Islam. Pertama sekolah- sekolah umum model belanda tapi diberi muatan pengajaran Islam dan kedua, madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi beberapa unsur dari substansi dan metodologi sistem pendidikan colonial Belanda. Selain itu pada saat yang bersamaan, pendidikan Islam di pesantren juga harus berhadapan dengan ekspansi sistem pendidikan model Eropa (gubernemen) yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda.

Sejak tahun 1840 dan terutama sejak mulai digulirkan kebijakan politik etnis (etische politek) pada tahun 1901, pemerintah Belanda mengembangkan sistem pendidikan umum bagi rakyat pribumi melalui aneka ragam persekolahan yang bersifat gradualisme. Yakni didasarkan kepada penggolongan penduduk menurut garis keturunan, lapisan social serta kebangsaan. Program tersebut dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah gubernemen, terutama pada pendidikan tingkat dasar dan pendidikan menengah dalam skala luas di berbagai tempat di Indonesia sejak dasawarsa 1870-an.

Seiring dengan kebijakan politik kolonial Belanda di Indonesia sejak akhir abad ke-19 terjadi kritik yang dilakukan kalangan kaum reformis terhadap sistem pendidikan pesantren pada awal abad ke-20, kalangan pesantren dengan sendirinya merespon sekaligus menyiasati apa yang terbaik untuk dilakukan. Dalam hal ini, sembari menolak paham serta asumsi-

asumsi keagamaan kaum reformis, komunitas pesantren pada saat yang sama namun dalam batas-batas tertentu mengikuti jejak langkah kaum reformis apabila pesantren ingin bertahan. Oleh karena itu, kalangan pesantren, kemudian melakukan pembaharuan dan pengembangan pesantren dengan mengadopsi beberapa dari unsur sistem kependidikan sekolah dan madrasah, khususnya sistem madrasah (klasikal) dan perjenjangan, yang mereka anggap tidak hanya akan mendukung kontinuitas pesantren yang akan tetapi juga bermanfaat bagi santri, namun tanpa mengubah sama sekali signifikansi isi sistem pendidikan tradisional Islam. Menghadapi tantangan itu kalangan pesantren merespon sedikitnya dengan melakukan pembaharuan pada struktur kelembagaan pesantren dan memperluas cakupan pendidikan diversifikasi di pesantren dengan membuka tipe-tipe sekolah umum. Hal tersebut dilakukan pesantren guna mendukung kontinuitasnya sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam.

Gambaran singkat diatas, sedikit banyak menjelaskan bagaimana respons pesantren dalam menghadapi perubahan-perubahan disekelilingnya melalui sejumlah pembaharuan sistem kependidikan pesantren. Namun demikian, karakteristik pembaharuan pesantren yang berlangsung di tiap daerah berbeda-beda. Dalam konteks regional inilah, maka gejala pembaharuan dan perkembangan dunia pesantren di Banten menjadi sebuah topic yang menarik untuk di teliti. Mengingat bahwa Banten adalah salah satu daerah konsentrasi dunia pesantren di pulau Jawa, dimana kiyai-kiyai mempunyai pengaruh yang kuat dikalangan masyarakat hingga sekarang. Pembaharuan atau modernisasi pesantren di Banten salah satunya dilakukan oleh perguruan Islam (pesantren) Al-Khairiyah yang didirikan di Citangkil, Cilegon pada tanggal 5 Mei 1916 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal tahun 1343 Hijriyah.

Pesantren semakin berkembang dan menunjukkan geliat modernisasi setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan cepat jumlah alumni pesantren yang melanjutkan studi di institusi non-agama, menguasai berbagai bidang ilmu, dan jumlah pengajar pesantren yang memiliki pendidikan umum non-pesantren. Sistem pesantren ini didirikan secara mandiri, berfokus pada kebutuhan masyarakat, dan menekankan partisipasi masyarakat, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai pendidikan yang berbasis masyarakat (Samudera 2023; Defnaldi et al. 2023).

Pendidikan berbasis Masyarakat perlu mengikuti modernisasi zaman, modernisasi merupakan kesempatan dalam pengembangan SDM dan Pendidikan dengan menyesuaikan dengan teknologi (Arif 2016). Umar (2023) menegaskan bahwa perlunya konsep baru

sebagai Solusi dari ketidakberdayaan perkembangan pondok pesantren yang masih belum mampu menyesuaikan dengan era 5.0 saat ini. Pemerintah mengatur terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjelaskan bagaimana pendidikan diselenggarakan di pesantren. Menurut UU Pesantren, pesantren memiliki peran dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia ingin memperkuat eksistensi pesantren dengan mengesahkan UU ini. Di era modern ini, pesantren yang menerapkan sistem pendidikan formal serupa dengan sekolah dan madrasah muncul, menandakan perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia.

Perkembangan Manajemen Pendidikan Islam

Secara konseptual, Pendidikan sebagai alat untuk pencerahan dan penyelamatan kehidupan manusia, pendidikan Islam membutuhkan pondasi yang kuat, arah yang jelas, dan tujuan yang jelas. Idealitas yang terkandung dalam sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis, diharapkan secara konsisten mendorong murid-muridnya untuk menjadi individu atau kelompok yang berkualitas, beriman, dan saleh sejak zaman dahulu (Na'im 2021). Maka dari itu, Pendidikan Islam adalah warisan dari peradaban Islam dan aset untuk pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan Islam tersebar di berbagai wilayah ini merupakan warisan sejarah yang harus dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Sebagai aset, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengatur dan mengelolanya sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Selama bertahun-tahun, pesantren telah mengalami perubahan hingga muncul model baru yang berakar pada model sebelumnya (H. P. Daulay 2019). Mengingat bahwa pendidikan Islam yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang tersebar di seluruh negeri ini memiliki karakteristik yang berbeda, diperlukan konsep dan arahan yang jelas tentang bagaimana mengelola lembaga pendidikan Islam sehingga menjadi maju dan profesional.

Diakui bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi masih jauh dari harapan umat karena kekurangan berbagai aspek, baik secara terpisah maupun bergabung dalam kompleks. Kekurangan tersebut perlu direspon dengan cepat dan tepat mengingat kebutuhan budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan, pendidikan sangat tinggi di era saat ini. Institusi pendidikan ini memainkan peran yang sangat strategis sebagai wadah untuk pertumbuhan pendidikan Islam. Lembaga tersebut disebut sebagai institusi atau lembaga pendidikan karena memiliki pelaku, fungsi yang jelas, atribut fisik, dan atribut simbolik. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan benar sangat

penting untuk keberlangsungan institusi agar dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi institusi.

Pendidikan Islam saat ini dikenal populer 3 jenis Lembaga yaitu madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Perkembangan Pendidikan Islam yang diawali dari pesantren, kini mulai banyak yang berkembang mendirikan madrasah-madrasah dan juga perguruan tinggi Islam dalam satu Yayasan.

Madrasah

Madrasah merupakan satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama yang sangat diminati oleh Masyarakat (Fikriah 2019). Dalam praktiknya, ada madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu umum serta ilmu-ilmu keagamaan (al-'ulum al-diniyyah). Ada juga madrasah yang hanya berfokus pada ilmu-ilmu agama, yang disebut madrasah diniyah. Masyarakat lebih memahami "madrasah" sebagai institusi pendidikan Islam sebagai "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan" karena kata itu berasal dari bahasa Arab dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Abrori and Hadi 2020).

Malfi et al. (2023) mengatakan bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia pada awal abad ke-20, madrasah Islamiyah yang bersifat formal didirikan dan lembaga pendidikan Islam mulai berkembang di Indonesia. (Daulay 2021; Daulay 2019) menyebutkan bahwa sejarah madrasah cukup dinamis, dan berperan dalam evolusi Lembaga Pendidikan Islam (Rohman 2017). Jauh sebelum adanya madrasah, lembaga pendidikan Islam sangat banyak, variatif, dan mencakup semua jenjang Pendidikan, diantaranya masjid, langar, kuttab, ribbath, halaqah, syuffah, halaqah, sollun, al-bimaristan, dan lain-lain. Institusi pendidikan ini mencakup semua jenjang pendidikan, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Ada juga yang syar'i, theologis, sufistik, dan akademik. Meskipun lembaga pendidikan tersebut belum menerima manajemen kontemporer, tetapi ada dasar yang jelas untuk kemajuan. (Sukhoiri 2018). Hingga saat ini sudah banyak pembaruan kurikulum sebagai prestasi kemajuan Sejarah social (Hidajati et al. 2019), yakni terbagi ke dalam dua periode:

1) Periode Sebelum Kemerdekaan

Pada masa itu, pendidikan agama Islam diajarkan melalui pengajaran al Quran dan kitab di rumah-rumah, masjid, pesantren, dan tempat lain. Pada perkembangan berikutnya, mengalami perubahan dalam hal kelembagaan, materi pengajaran (kurikulum), metode, dan struktur organisasi, menciptakan jenis baru yang disebut madrasah. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah berfungsi untuk menghubungkan tradisi dengan cara

mempertahankan nilai-nilai murni yang masih dapat dipertahankan dan mengadopsi nilai-nilai baru dari bidang teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat (Madarik 2018; Malfi et al. 2023). Oleh karena itu, materi yang diajarkan di madrasah sebagian besar sama dengan yang diajarkan di surau dan pesantren, bersama dengan beberapa materi yang dikenal sebagai ilmu umum.

Di Padang Sumatera Barat, Syekh Abdullah Ahmad mendirikan madrasah adabiah pertama di Indonesia pada tahun 1909. Pada masa itu, sekolah tersebut diberi nama resmi Adabiyah School, meskipun istilah "madrasah" dan "sekolah" memiliki arti yang sama, dan orang-orang tampaknya belum terbiasa menggunakan istilah tersebut. Pada awalnya, Madrasah Adabiyah berfokus pada agama. Namun, pada tahun 1915, itu berubah menjadi H.I.S (Holand Inland School) Adabiyah (Darmawi 2022; Syamsuddin 2004; Luthfiyani and Sirozi 2023; Al Farabi 2020).

HIS Adabiyah merupakan sekolah pertama yang memasukan pelajaran agama kedalamnya. Kemudian pada tahun 1910 didirikanlah sebuah Madrasah School (Sekolah Agama) yang dalam perkembangannya berubah menjadi *Diniyah School* (Madrasah Diniyah). *Diniyah School* inilah, yang kemudian berkembang dan terkenal. Di madrasah Adabiyah sendiri, materi pelajaran yang diajarkan bukan hanya materi agama. Tetapi di dalamnya juga diajarkan materi pelajaran umum, seperti matematika, sejarah, fisika, ilmu bumi, bahasa inggris dan sebagainya. Dengan mengajarkan materi pelajaran umum lainnya, Madrasah adabiyah secara tidak langsung dikelola dengan mengikuti perkembangan zaman (Al Farabi 2020). Hampir di seluruh Indonesia, model lembaga pendidikan Islam berkembang dari Madrasah diniyah, baik di dalam pesantren, surau, langgar dan yang lainnya. Upaya K.H. Ahmad Dahlan untuk membaharui pendidikan Islam, madrasah muhamadiyah pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tahun 1918 (Irwin Hidayat 2019; Hidayat et al. 2022; Ismail 2014). Setelah itu, namanya berubah menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran di pesantren, K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan madrasah shalafiyah di lingkungan podok pesantren Tebuireng di Jombang pada tahun 1916, tahun 1929 menimbulkan kekacauan dengan memasukkan pengetahuan umum (Hasibuan 2016).

2). Periode Sesudah Kemerdekaan

Mariana and Helmi (2022); Rahmat (2014) menyebutkan bahwa setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Departemen Agama dibentuk pada 3 Januari 1946 untuk menangani masalah keberagamaan di Indonesia, termasuk pendidikan,

terutama madrasah. Setelah itu, Departemen Agama mulai membantu madrasah, tetapi hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh tiga menteri (Menteri Agama, Menteri P&K (Dikbud) dan Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975 memperjelas posisi madrasah. SKB tersebut mencakup beberapa masalah penting, seperti yang disebutkan dalam bab II pasal 2 berikut: (a) ijazah madrasah dapat dinilai setara dengan ijazah sekolah umum yang setara (b) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih tinggi (c) siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Ini menunjukkan bahwa Madrasah telah disejajarkan dengan sekolah umum dan jumlah Madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia semakin meningkat.

Sedangkan mengenai manajemen madrasah, dapat dibagi berdasarkan rentang tahun sebagai berikut :

1) Perkembangan manajemen madrasah awal kemerdekaan sampai orde baru

Pada tahun 1950, negara secara resmi mengakui madrasah sebagai lembaga pendidikan. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 menetapkan bahwa "*belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementrian Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum.*"

Luthfiyani and Sirozi (2023) menyebutkan bahwa perubahan pada madrasah dimulai ketika Madrasah Wajib Belajar (MWB) dibuka pada awal tahun 1950-an oleh Kementrian Agama, yang dipimpin oleh K.H Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama. Pengembangan jiwa bangsa adalah tujuan dari MWB, yang mencakup pengembangan ekonomi, industri, dan transmigrasi melalui program yang mengatur tiga perkembangan: perkembangan otak, perkembangan hati, dan perkembangan ketrampilan tangan. MWB berlangsung selama 8 tahun, dengan tujuan memberikan bantuan dan pembinaan kepada madrasah dalam upaya meningkatkan kualitas madrasah Ibtidaiyah dengan menyeragamkan materi kurikulum dan sistem penyelenggaraannya pada umur 6 tahun dan pada umur 15 tahun, sesuai dengan undang-undang perburuhan, di mana anak-anak diizinkan untuk mencari nafkah pada usia tersebut. Namun, MWB tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena beberapa faktor diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana; ketidakmampuan pemerintah untuk mempersiapkan guru; kurangnya minat masyarakat terhadap penyelenggaraan madrasah; dan masyarakat menganggap bahwa 25% mata pelajaran agama, sehingga MWB tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga pendidikan agama. Pada tahap ini, dapat disimpulkan bahwa aspek manajemen masih lemah dan kebutuhan akan lebih banyak guru.

2) Perkembangan manajemen madrasah pada masa orde baru (1965- 1997)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, SKB 3 Menteri menjelaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, dengan tambahan mata pelajaran umum diberikan sekurang-kurangnya 30%. Sementara itu madrasah mencakup tiga tingkatan, yaitu: a) Madrasah Ibtidaiyah, setingkat SD; b) Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP; c). Madrasah Aliyah setingkat SMA. Pada tahun 1976, Departemen Agama menetapkan kurikulum setandar untuk digunakan oleh madrasah untuk MI, MT, dan MA dalam rangka merealisasikan SKB 3 Menteri.

Setelah Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISPENAS) diberlakukan, langkah-langkah strategis tambahan untuk mengubah madrasah menjadi sekolah umum dapat diambil. Sehubungan dengan hal ini di atas, Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam (terdiri dari MI dan MTS) dan Nomor 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah. Pada saat itu, Departemen Agama membentuk lembaga tersebut untuk mengatasi kekurangan ulama. Surat Menteri Agama No.371 tahun 1993 tentang Madrasah Aliah Keagamaan, yang kurikulumnya diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 374 tahun 1993. Pada tahap ini, madrasah mengikuti kurikulum yang diatur oleh pemerintah, yang mencakup sebaran materi pelajaran agama sebesar 30%. Akibatnya, madrasah melakukan perubahan pada jadwal pelajaran mereka, yang mengakibatkan pengurangan mata pelajaran muatan lokal yang menjadi ciri khas madrasah.

3) Perkembangan manajemen madrasah masa reformasi (1997- sekarang)

Selama reformasi ini, ada otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan (Aisyah 2023). Sebelum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 diberlakukan, madrasah mengalami beberapa perubahan, seperti (1) Pengelolaan daerah Kabupaten Kota mencakup operasional penyelenggaraan, penjabaran kurikulum, penyediaan tenaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, dan penyediaan anggaran (2) Pengelolaan pemerintah pusat juga termasuk di dalamnya.

Reformasi harus didorong agar berkesesuaian dengan zaman (Hairullah 2023). Beberapa hal menjadi perhatian pemerintah pusat: (a) membuat standar kompetensi siswa dan warga belajar, mengatur kurikulum dan penilaian hasil belajar nasional serta pedoman pelaksanaannya (b) membuat standar materi pelajaran pokok (c) membuat standar perolehan dan penggunaan gelar akademik (d) membuat pedoman pembiayaan penyelenggaraan

pendidikan (e) membuat persyaratan untuk perpindahan, sertifikasi siswa, dan warga belajar

(f) Aspek pemberdayaan madrasah akan mengalami perubahan, termasuk: (1) peningkatan kekuatan manajemen, yang mencakup kekuatan sumber daya manusia untuk kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, pengawas, dan individu lainnya; dan (2) persiapan untuk memasuki era manajemen berbasis sekolah. Pada tahap ini, pengelolaan lembaga madrasah tidak sepenuhnya diatur oleh Pusat, tetapi juga oleh Madrasah sendiri. Ini memungkinkan pengembangan potensi saat ini dengan mempertimbangkan karakteristik Madrasah yang dikelola. Selanjutnya, status atau keberadaan Madrasah menjadi lebih kuat secara undang-undang.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003, pengembangan model Madrasah sangat memberi kebebasan untuk membuat model apa yang diharapkan dari mendirikan Madrasah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Misalnya, model madrasah berfokus pada mencetak generasi pada sisi akademisi atau menghasilkan lulusan kejuruan yang siap untuk bekerja setelah lulus, dan era otonomi daerah saat ini, yang berdampak pada perubahan politik pendirian madrasah. Perubahan kebijakan ini mendorong pendidikan madrasah untuk "*back to basic*", yaitu kembali ke khittah semula sebagai lembaga pendidikan masyarakat.

Kemudian, buku pelajaran agama seperti buku pengetahuan umum di sekolah umum, mulai disusun khusus untuk tingkat madrasah. Lalu, bermunculan sekolah-sekolah modern dengan sistem perjenjangan, seperti Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat dasar, Madrasah Tsanawiyah untuk tingkat menengah pertama, Madrasah Aliyah dan Kuliah Muallimin untuk pendidikan guru. Selain itu, masalah utama madrasah adalah manajemen (pengelolaan) pendidikan yang buruk, kualitas tenaga pengajar yang buruk, dan kekurangan dana untuk operasi sehari-hari (Chandra 2020; Murtadlo 2016; Magdalena 2022; Darmadji 2015). Praktik manajemen madrasah terhambat oleh model paternalistik atau feodalistik (Fathorrahman 2017). Ide-ide pembaruan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, ide-ide kreatif dan inovatif dari kalangan muda terkadang dianggap sebagai sikap tidak menghargai para senior.

Ditegaskan pula melalui catatan dari Ramayulis (dalam Febriani, Rehani, and Zalnur 2022; Jono, Firman, and Rusdinal 2019; Irfan, Muslim, and Hidayatullah 2022) bahwa di antara persoalan yang dihadapi madrasah adalah: 1) kualitas guru yang belum memadai; 2) terbatasnya sumber daya manusia dan dana; 3) produktivitas lembaga yang kurang bermutu; 4) efisiensi pendidikan yang rendah; 5) relevansi pendidikan dengan dunia kerja; 6) manajemen pendidikan yang masih seragam (belum mempertimbangkan kebutuhan

Lembaga pribadi); 7) proses pembelajaran yang kaku; 8) sarana dan prasarana yang belum lengkap; 9) perpustakaan yang belum memadai; dan 10) kualitas input dan output yang rendah.

Mulyasa (dalam Faiqoh 2019; Perdana and Bungai 2020; Aslan 2016) menyebutkan lima strategi pokok pengembangan madrasah ke arah yang lebih baik: a) strategi peningkatan layanan pendidikan di madrasah; b) strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di Madrasah; c) strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di Madrasah; d) strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah; e) strategi pemberdayaan kelembagaan madrasah. Dengan melihat perkembangan Madrasah yang semakin berkembang secara kuantitas tetapi belum melihat dari perspektif kualitas, jelas bahwa pola pengelolaan atau manajemen memainkan peran penting dalam pengembangan madrasah.

Pesantren

Kata "pesantren" berasal dari kata "santri", yang memiliki awalan "pe-" dan akhiran "an." Arti dari kata ini adalah "asrama", tempat para santri tinggal, atau tempat para siswa belajar mengaji, dan sebagainya. Istilah Tamil "santri" berarti guru ngaji. Menurut sumber yang berbeda, kata itu berasal dari kata bahasa India chasti, yang berarti "buku-buku suci", "buku-buku agama", atau "buku-buku ilmu pengetahuan". Kata "pondok" dan "pondok pesantren" sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya dari segi bahasa karena keduanya berasal dari bahasa funduq, yang berarti hotel dan pesantren. Pesantren dianggap sebagai tempat pendidikan agama di masyarakat Indonesia (Susilo and Wulansari 2020; Abdurrahman 2020). Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, biasanya dengan cara non-klasik, seorang kyai mengajarkan agama Islam kepada para santri. Para santri biasanya tinggal di pondok dan dididik oleh kyai berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh para ulama abad pertengahan. Pesantren awalnya didirikan sebagai lembaga pendidikan untuk orang Islam di pedesaan yang bertujuan untuk mempertahankan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh orang Islam di pedesaan. Ini dapat dipahami bahwa awalnya pesantren adalah lembaga swadaya yang didirikan secara mandiri, didukung penuh oleh masyarakat, dan tidak membutuhkan persetujuan pemerintah.

Kajian terhadap manajemen pendidikan Islam di pesantren sendiri dapat dilihat berdasarkan model pesantrennya sendiri yang secara umum model pesantren sebagai berikut:

1) Pondok pesantren salaf, atau pondok tradisional lainnya. Kelahirannya bukan satu-satunya aspek tradisionalitas pesantren salaf ini. Namun, dikatakan bahwa dia juga

menggunakan sistem manajemen konvensional dalam hal aspek manajemennya. Sistem manajemen tradisional ini biasanya berjalan secara natural dan bahkan tanpa upaya untuk melakukan pengelolaan yang efektif. Kiai, pengasuh biasanya bertanggung jawab atas kepemimpinan sekolah, sehingga mereka sepenuhnya memiliki kendali atas semua kebijakan pendidikan, seperti penentuan materi pelajaran, waktu pembelajaran, dan sebagainya. Manajemen pendidikan pesantren salaf disebut sebagai "manajemen "mono" atau "manajemen "mono", dan fokus utamanya adalah figur kiai sebagai pengasuhnya. Kebanyakan pesantren tradisional dikelola berdasarkan tradisi daripada profesionalisme berdasarkan keahlian (skill), baik human skill, conceptual skill, maupun technical skill. Model pendidikan pesantren salaf adalah melalui sistem bandungan-wetonan dan sorogan. Bandungan dilakukan dengan pendidikan secara kolektif dipandu oleh Kiai. Kiai memerankan peran penting dan utama dalam pengajaran pada santri (Anita et al. 2022). Bandungan umumnya dilakukan dengan mengambil wetonan, yaitu hari-hari pasaran tertentu seperti kliwonan, pahingan. Sedangkan sorogan adalah model pendidikan tiap santri menghadap pada kiai untuk mengkaji kitab- kitab tertentu (Rohmat 2019).

Dalam perspektif manajerial, landasan tradisi dalam mengelola suatu lembaga pesantren menyebabkan produk pengelolaan itu asal jadi, tidak memiliki fokus strategi yang terarah, dominasi personal terlalu besar, dan cenderung eksklusif dalam pengembangannya. Jika diamati keberadaan pesantren salaf walaupun secara pengelolaan itu belum terorganisir dengan baik namun secara keberlangsungan eksistensi pesantren bisa berjalan dengan baik karena tentunya didukung oleh masyarakat sekitar dan adanya bentuk pendanaan secara swadaya dari masyarakat sekitar dan kontribusi dari pengasuh itu sendiri. Pesantren Salaf selalu dioposisikan dengan arus globalisasi (Imam and Hamzah 2023).

2) Pesantren khalaf. Pesantren memiliki sifat yang terbuka terhadap perubahan. Di samping itu, pesantren khalaf atau modern memiliki sistem dan manajemen pendidikan tersendiri sebagai respons terhadap tuntutan perkembangan zaman, sains dan teknologi. Pesantren khalaf dikelola dengan manajemen yang rapi dan sistematis sesuai dengan kaidah manajerial pada umumnya (Mas'ulah 2019). Dengan demikian, pola kepemimpinan dalam pesantren khalaf ini pastinya juga tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi lebih kepada pola kepemimpinan yang demokratis. Keberadaan pesantren khalaf (modern) saat ini juga semakin berkembang. Para orangtua banyak memondokkan putra/putri di pesantren khalaf ini karena menganggap model pesantren ini bisa memenuhi keinginan orangtua dan bisa mengikuti perkembangan zaman, pesantren ini juga familiar disebut *Islamic Boarding school* (Hidayat et al. 2022).

3) Campuran pesantren salaf dan khalaf. Selain dua model pesantren yang dijelaskan sebelumnya, ada juga model pesantren yang menggabungkan kedua model pesantren tersebut, yakni model pesantren semi salaf dan khalaf atau percampuran. Artinya percampuran disini, bahwa pesantren mengaku dan menanamkan diri pesantren salafiyah, namun juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang (modern). Dalam pengelolaan lembaga lebih mengarah ke model khalaf yakni dengan manajerial yang baik namun tetap mempertahankan karakteristik atau kultur pesantren salaf Dengan demikian secara garis besar manajemen pendidikan Islam di pesantren ditentukan oleh ciri dan karakteristik pesantren itu sendiri.

Setiap pesantren dengan cirinya masing-masing akan banyak mempengaruhi seperti apa sistem manajerial pendidikan yang diterapkan di dalamnya. Harus diakui bahwa tidak mudah menerapkan prinsip manajemen pendidikan bagi semua lembaga pesantren yang ada di Indonesia ini. Sebab, sebuah ciri dan karakter suatu pesantren banyak diwarnai oleh visi-misi, motif dan juga kondisi sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Hal ini perlu menjadi bahan dalam perencanaan manajemen dan implementasi peningkatan kualitas lulusan setiap pesantren (Misini et al. 2023)

Secara umum pesantren masih menghadapi kendala serius menyangkut ketersediaan sumber daya manusia profesional dan penerapan manajemen yang umumnya masih konvensional, misalnya tiadanya pemisahan yang jelas antara yayasan, pimpinan madrasah, guru dan staf administrasi, tidak adanya transparansi pengelolaan sumber-sumber keuangan, belum terdistribusinya pengelolaan pendidikan, dan banyaknya penyelenggaraan administrasi yang tidak sesuai aturan baku organisasi dan juga kiai masih merupakan figur sentral dan penentu kebijakan pendidikan pesantren. Hal tersebut menjadikan banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang harus bisa diatasi oleh pemangku kebijakan pesantren dalam hal ini pengasuh yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pesantren yang lebih baik dan ini bisa mengubah stigma negatif terhadap manajemen pesantren yang diasumsikan tidak terkelola dengan baik.

Perguruan Tinggi Islam

Hasrat umat Islam untuk mendirikan pendidikan tinggi sudah dirintis sejak zaman kolonial Belanda. M. Natsir menulis dalam *Capita Selecta*, bahwa keinginan untuk mendirikan pendidikan tinggi Islam itu telah muncul di hati umat Islam. Pedoman Masyarakat nomor 15 membentangkan cita-cita beliau yang mulia akan mendirikan satu sekolah tinggi Islam itu akan berpusat di tiga tempat, yakni Jakarta, Solo dan Surabaya. Di

Jakarta akan diadakan sekolah tinggi sebagai bagian atas Sekolah Menengah Muhammadiyah (AMS) yang bersifat Westersch (kebaratan). Di Solo akan diadakan sekolah tinggi untuk mendidik mubalighin.

Di Surabaya akan diadakan sekolah tinggi yang akan menerima orang-orang pesantren. Kendatipun yang diungkapkan ini masih dalam bentuk ide, akan tetapi semangat untuk mendirikan perguruan tinggi Islam itu telah muncul pada tahun 1930-an. Mahmud Yunus menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi yang pertama di Minangkabau, bahkan di seluruh Indonesia, ialah Sekolah Islam Tinggi, didirikan oleh persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang dipimpin oleh Mahmud Yunus. Sekolah Tinggi itu dibuka secara resmi pada tanggal 9 Desember tahun 1940, terdiri dari dua Fakultas yakni Fakultas Syariat (Agama) dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Sekolah Tinggi itu berjalan dengan lancar sampai tahun 1942. Tetapi sayang ketika Jepang masuk kota Padang (Maret 1942) dan memerintah Indonesia, maka Sekolah Islam Tinggi itu terpaksa ditutup, karena pemerintah Jepang hanya mengizinkan membuka sekolah/madrasah dari tingkat yang rendah saja. Dengan demikian berakhir riwayat Sekolah Islam Tinggi PGAI di Padang. Dan pada perkembangan perguruan tinggi Islam selanjutnya melalui Peraturan No. 34 Tahun 1950, fakultas agama Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta diubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Hal ini disebabkan cakupan pengetahuan agama Islam yang demikian luas tidak mencukupi untuk diajarkan dalam satu fakultas. Pada tahun 1960, PTAIN dengan ADIA (Akademi Dakwah Islam) Jakarta disatukan. Sejak tanggal 9 Mei 1960 namanya menjadi IAIN al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah yang berada di dua kota, yaitu Yogyakarta dan Jakarta.

Aspirasi umat Islam pada umumnya dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam pada mulanya didorong oleh beberapa tujuan. Pertama, untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah. Kedua, untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam. Ketiga, Untuk mereproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan, baik pada kalangan birokrasi negara maupun sektor swasta, serta lembaga-lembaga sosial, dakwah, pendidikan dan sebagainya. Dengan lahirnya Perguruan tinggi Islam yang sudah ada pada masa penjajahan ini menunjukkan adanya semangat yang luar biasa dari tokoh-tokoh akademis dalam mencetak generasi penerus bangsa ini dan menjadikan perguruan tinggi sebagai wadah lanjutan dari tingkatan pendidikan sebelumnya yakni tingkat SMA atau MA dan sederajat.

Dalam uraian perguruan tinggi Islam atau yang lazim dengan nama perguruan tinggi agama Islam (PTAI) ini penulis kategorisasi sebagai berikut: 1) Dari segi aspek tanggung jawab pengelolaan, perguruan tinggi agama Islam (PTAI) terpolarisasi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) dan perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS); 2) Dari segi pendanaan PTAIN dikelola dan didanai hampir sepenuhnya oleh pemerintah/negara, sedangkan PTAIS dikelola dan didanai hampir sepenuhnya oleh masyarakat; 3) Dari segi ruang lingkup program studi yang ditawarkan, PTAIN terpolarisasi menjadi sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN), institut agama Islam negerian (IAIN), dan universitas Islam negeri (UIN). Begitu pula PTAIS terpolarisasi menjadi sekolah tinggi, institut, atau universitas dengan menggunakan nama Islam maupun tokoh muslim. Disamping itu, PTAIS sebenarnya juga mencakup ma'had aly (pesantren luhur atau pesantren setingkat perguruan tinggi).

Dari uraian diatas sudah bisa menggambarkan bagaimana bentuk pengelolaan lembaga perguruan tinggi Islam tersebut yang mana bisa ditarik benang merah adanya klasifikasi perguruan tinggi Islam memiliki 2 tipe, yakni negeri dan swasta. Sehingga dari sini bisa menggambarkan dari sisi finansial tentunya sudah barang tentu untuk perguruan tinggi Islam yang tipe negeri tidak ada kendala karena dapat dana dari pemerintah langsung, hal ini berbanding terbalik yang tipe swasta yang harus berjuang dalam hal pendanaan karena masih membutuhkan adanya swadaya dari masyarakat. Pada umumnya PTAIN lebih maju dibanding PTAIS selain sisi pendanaan yang memadai, juga manajemen lebih profesional, kontrol yang ketat, serta dukungan masyarakat yang lebih kuat dan luas. Namun secara khusus, dalam kasus-kasus tertentu, mungkin saja ada perguruan tinggi agama Islam swasta yang lebih berkualitas dari pada perguruan tinggi agama Islam negeri. Perkembangan mutakhir dalam pendidikan tinggi Islam adalah berubahnya STAIN/IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Pengembangan ini dilandasi perlunya integrasi keilmuan yang pernah menjadi diskursus masyarakat Islam di tanah air. Capaian pengembangan yang dilakukan oleh STAIN/IAIN menjadi UIN menjadi gambaran bahwa dalam aspek manajerial lembaga mereka bisa dikatakan sudah baik dan profesional, karena tentunya tidak mudah berubah statusnya jika tidak didukung oleh manajerial yang profesional.

C. METODE

Sebuah Studi Kualitatif Deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dilakukan pemilihan, kategorisasi, dan penjelasan, kemudian dijelaskan ulang oleh peneliti. Data diperoleh melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada Ketua Umum PB Al-Khairiyah sekaligus ketua yayasan Al-Khairiyah, H Ali Mujahidin, S.HI, MM. Berdasarkan kebutuhan penelitian melalui kegiatan rapat pleno PB Al-Khairiyah pada Sabtu 15 Januari 2022 di kampus Al-Khairiyah Citangkil Cilegon provinsi Banten. Hasil transkrip wawancara dianalisis menggunakan metode coding. Peneliti mentranskrip semua hasil wawancara, kemudian menginterpretasi hasil berdasarkan paragraph per paragraf, kalimat per kalimat, dan kata per kata.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Historis Lembaga Pendidikan Al-Khairiyah

Catatan sejarah menunjukkan, Al-Khairiyah didirikan oleh tokoh pendidikan yang juga pejuang kemerdekaan, Brigjen KH Syam'un pada 1916 dalam bentuk pengajian yang kemudian pada 5 Mei 1925 dimantapkan menjadi organisasi yang lebih terstruktur dan formal. Nama "Al-Khairiyah" diambil dari sebuah nama bendungan di Sungai Nil Mesir, dengan harapan dapat menambah semangat juang KH Syam'un dalam dunia pendidikan serta membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, agama dan negara, sebagaimana bendungan tersebut yang memberi manfaat bagi masyarakat Mesir.

KH Syam'un yang lahir pada 05 April 1894 di kampung Beji, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang yang saat itu masih berupa Keresidenan Banten dan masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi pada November 2018. Ketua Umum PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin selaku cucu dari KH Syam'un berharap agar anak-anak didik di lingkungan Al-Khairiyah, termasuk para mahasiswa Universitas Al-Khairiyah (Unival) dapat meneladani semangat juang Pahlawan Nasional tersebut dalam kiprahnya memajukan masyarakat, agama, dan negara.

KH Syam'un dalam perjalanan hidupnya juga dikenal sangat menghargai waktu serta selalu berpikir positif, holistik (sinergis), strategis, proaktif, antisipatif, sistematis, dan egaliter serta selalu siap melayani dan memberikan keteladanan. Pahlawan Nasional Brigjen KH Syam'un itu sendiri adalah keturunan dari KH Wasid, seorang ulama besar dan tokoh perlawanan para petani Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1888.

Gerakan-gerakan sosial keagamaan terutama yang berkaitan dengan Islam biasanya meliputi gerakan politik, sosial, pendidikan, dan da'wah. Sebuah fenomena yang terjadi

pada setiap gerakan Islam adalah sebuah cerminan jiwa umat Islam pada zamannya. Pada dasarnya sudah diketahui bahwa khittah Al-Khairiyah adalah pendidikan dan da'wah. Sehingga meskipun ada kesepakatan dengan PT Krakatau Steel 1974-1978, tetap mempertahankan tradisi pesantrennya secara utuh (Permana and Hidayat 2018)

Sementara berdasarkan pengamatan penulis aspek-aspek politik Al-Khairiyah juga sangat terlihat jelas terutama dalam melihat kader-kadernya yang ikut serta berlaga dalam pemilihan Pemimpin Daerah dan Pusat. Dalam da'wah Al-Khairiyah diutamakan semangat untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari keburukan (*ta'muruna bil ma'ruf, watanhauna 'anil munkar*). Al-Khairiyah memiliki dua lembaga yaitu berupa Yayasan Al-Khairiyah yang mengurus sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan dan Pengurus Besar yang fokus dalam bidang da'wah Islamiyah kepada umat Islam, utamanya di bidang kerohanian, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berkenaan dengan bidang da'wah ini, Yusuf Kalla dalam musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama (NU) di Banjar, Jawa Barat pada hari Jum'at 1 Maret 2019, menyatakan bahwa bagian dari da'wah selain aqidah (ketauhidan) dan ibadah adalah mu'amalah atau interaksi sosial kepada sesama yang dinilainya juga sangat penting.

Tercatat dalam sejarah ketika terjadi pemerintahan yang kritis karena ditangkapnya para tokoh nasional dan terhambatnya peredaran Mata Uang, Banten tetap tegar dengan mencetak uang sendiri yang bernama ORIDAB dengan alat seadanya yang disediakan oleh KH Syam'un sang Pendiri Al-Khairiyah. Dua target besar Banten dalam pembentukan manusia yang unggul yaitu di bidang spiritual dan semangat berjuang demi bangsa dan negara sudah menjadi darah daging di tengah masyarakat Banten. KH Syam'un, pendiri Al-Khairiyah adalah seorang prajurit yang seangkatan dengan Panglima Besar Soedirman ketika sama-sama ikut serta dalam PETA dan terlibat langsung dalam pendirian angkatan bersenjata secara mandiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. KH Syam'un dengan pangkat terakhir sebagai Brigadir Jenderal pernah ikut serta menjadi pendukung diangkatnya Soedirman sebagai panglima pertama untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Murid-murid pertama KH Syam'un banyak yang terlibat dalam usaha kemerdekaan Indonesia. K.H. Abdul Fatah Hasan sebagai salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mulai bersidang pada tanggal 10 Juli 1945, Prof. Sadeli Hasan yang terlibat di partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) yang didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta dan menjadi tokoh pendidikan di bidang tafsir, dan KH Syam'un serta murid-muridnya yang menjadi tokoh-tokoh politik pada saat Indonesia merdeka. KH Syam'un sendiri menjadi bupati ke12

di Serang dan murid-muridnya seperti KH Ali Jaya dan lainnya banyak yang menjadi camat. KH Syam'un memimpin Serang mulai dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1947.

Kota-kota di Banten memiliki sebutan kota sejuta santri, seribu kyai. Salah satunya adalah Cilegon dijuluki sebagai Kota Santri dengan monumen yang melegenda yaitu adanya Gunung Santri di sebelah utara kota Cilegon. Di kota inilah lahir para pejuang kemerdekaan yang militan. Sebut saja Geger Cilegon yang sempat membuat murka para penjajah Belanda karena banyaknya korban yang berjatuh dari pihak Belanda. Aktor utama dari tragedi tersebut adalah seorang kyai besar, KH Wasid yang sezaman dengan Syeikh Nawawi Tanahara, kedua-duanya adalah pejuang bangsa, Syeikh Nawawi berjuang dengan pena di dunia pendidikan dan KH Wasid berjuang dengan senapan di medan perang. KH Wasid tiada lain adalah kakek dari KH Syam'un. Darah pejuang dari sang kakek mengalir dan menjadikan hidupnya secara penuh diabdikan untuk bangsa, negara, dan agama. Gelar pahlawan yang baru diperoleh KH Syam'un pada tahun 2018 adalah bukti nyata bahwa ia adalah sosok pahlawan kebanggaan masyarakat Banten utamanya kota Cilegon. Ia tidak mewarisi apapun di bidang harta benda, tapi beliau telah berhasil mewariskan Al-Khairiyah. Al-khairiyah sebagai salah satu lembaga sosial secara konsisten melakukan gerakan sosial untuk membangun kerohanian dan spiritualitas masyarakat Cilegon Banten. Gerakan Al-Khairiyah utamanya mengembangkan pemahaman Islam yang sesuai dengan Aqidah Ahlu Sunah Wal Jama'ah berasaskan pada Al-Qur'an dan hadits. Karena sebagaimana diketahui bahwa warisan animisme, dinamisme, dan politeisme masih tampak di masyarakat sehingga menimbulkan keragaman dalam cara mengamalkan ajaran agama, walaupun sama-sama memeluk Islam.

Cara pandang Al-Khairiyah dalam mempertahankan ideologi dapat dikaitkan dengan teori Syafii Anwar yang menggolongkan gerakan sosial Islam yang ada di Indonesia ke dalam lima kelompok, yaitu: 1) Kelompok Fundamentalisme-Radikal, Kelompok ini dinilai sangat ekstrim karena pemahamannya cenderung bersifat absolut pada teks klasik Islam. Orientasi pemikirannya cenderung tekstual sehingga terlihat kaku. 2) Kelompok Formalis-Simbolik, Kelompok ini memunculkan makna-makna simbolik dalam pemikirannya sehingga lebih sering memaknai teks secara kontekstual dan memilih interpretasi baru yang lebih kekinian dalam menentukan sikap dalam pemikiran-pemikiran yang terbuka dengan segala bentuk kritik. 3) Kelompok Rasional-Inklusif, Kelompok yang cenderung terbuka dan lebih mendahulukan pemikiran secara logis dari pada mengacu pada suatu teks tertentu dari ayat-ayat suci maupun hadits nabi. Hasil pemikiran seolah dinilai sama dengan suatu teks tertentu jika dikemukakan oleh orang yang memiliki kecerdasan tertentu. 4) Kelompok

Emansipatoris-Transformatif, Sebuah kelompok yang cenderung kepada misi Islam yang dinilai lebih kepada kemanusiaan dan pemberdayaan (profetik). Masyarakat menurut kelompok ini harus ditransformasikan secara norma dan etik sehingga unggul dibidang sosial dan ekonomi. 5) Kelompok Liberal, Kelompok ini lebih mengutamakan pada penilaian bahwa Islam adalah pengisi kehidupan utama dalam masyarakat sehingga harus diarahkan pada hal-hal komplementer dalam kehidupan.

Manajemen Lembaga Pendidikan Al-Khairiyah

Mayoritas masyarakat di Banten mengenal Al-Khairiyah yang memiliki lembaga pendidikan dengan sekitar 500 cabang. Sayangnya, Al-Khairiyah di mata masyarakat Cilegon Banten lebih dikenal hanya sebatas lembaga pendidikan, jarang yang mengenalnya sebagai sebuah organisasi massa (ORMAS). Hal itu karena sebagai ORMAS, Al-Khairiyah pernah mengalami mati suri yang cukup lama. Padahal, Al-Khairiyah telah berbaur langsung dengan masyarakat miskin, yaitu mereka yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal dan terlebih lagi sepek terjangnya di kancah politik yang terus menggema, terutama pada perjuangan ide dan gagasan, *cultural meaning* dan isu-isu kontemporer.

Al-Khairiyah juga terus berjuang dalam pembentukan mental masyarakat miskin karena masyarakat miskin adalah kelompok sosial yang paling rentan terhadap praktik syirik sebagaimana sabda Nabi "*Hampir-hampir kemiskinan mendekati kekafiran*" (HR. Abu Na'im). Hal ini sejalan dengan pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan, beliau pun focus melakukan pendekatan-pendekatan kepada Masyarakat fakir miskin di sekitar tempat tinggalnya salah satunya memberikan sedekah (Haedar Nashir 2015).

Tumbuh kembang gerakan-gerakan sosial pasca reformasi memanfaatkan peluang politik yang dibuka dan diinisiasi oleh kaum kapitalis. Peluang di dunia politik juga mengubah cara pandang organisasi masyarakat terhadap kondisi sosial di lingkungan organisasinya, termasuk perubahan-perubahan yang signifikan dari cara pandang Al-Khairiyah terhadap problem warga Al-Khairiyah adalah sebuah reorientasi gerakan sosial. Al-Khairiyah di awal kembangkitannya pasca reformasi merenungkan kembali arah gerakan dan berusaha mempertajam wawasan guna menentukan sikap yang benar agar kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali.

Al-Khairiyah berusaha untuk menemukan jati diri gerakannya, atau dalam bahasa David Osborne dan Peter Plastrik disebut sebagai "*the core strategy: creating clarity purpose*". Kondisi beragama kurang mendapat iklim yang baik sejak zaman pemerintahan kolonial. Nilai-nilai moral terancam oleh situasi lingkungan yang merusak. Hal ini bisa disebabkan

karena untuk mengembangkan sebuah kurikulum agama, diperlukan dukungan dari lingkungan (Usman 2017). Kini modernisasi yang dianggap sebuah kemajuan hanya menyentuh pembangunan fisik. Padahal membangun masyarakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional tidak hanya mementingkan segi fisik/jasmani tapi juga segi rohani, tidak hanya mementingkan material tapi juga spiritual.

Perwiranegara (dalam Syukri and Abidin 2019) setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar ide keagamaan dapat dikembangkan di tengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin terlihat kompleks, yaitu reformulasi konsep dan sosialisasi nilai keagamaan. Nilai dan konsep inilah yang pada akhirnya menjadi daya tahan bangsa dan Negara dalam membendung kerusakan moral bangsa di abad ini. Harapan formal terhadap agama dan umat beragama terutama adalah mengatasi dampak dan ekses modernisasi yang menggilas keberadaan masyarakat miskin. Umat Islam dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap proses modernisasi. Disini agama ditempatkan pada posisi defensif, yaitu harus melayani tujuan dengan cara-cara modern. Apabila agama tidak mampu menyesuaikan diri dan tidak berfungsi efektif dalam mengatasi dampak dan akses modernisasi, maka tentunya agama akan diperkirakan tidak lagi relevan dan ditinggalkan.

Problem bangsa Indonesia saat ini sebagai negara berkembang adalah mulai berkurangnya pemahaman keagamaan pada generasi muda bangsa. Kemunduran umat Islam selain disebabkan oleh dogmatisme dan sikap taqlid juga disebabkan oleh keadaan umat Islam yang tidak lagi seluruhnya menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kekhawatiran Nigel Barber tentang sebuah keniscayaan yang akan terjadi baik di negara-negara maju maupun berkembang, bahwa sebagian besar orang akan menjadi atheis. Pada saatnya nanti, orang lebih mengutamakan kondisi finansial dari pada agamanya. Agama, paling lambat akan punah tahun 2041 mendatang. Prediksi Nigel perlu direspons dengan cepat oleh organisasi-organisasi keagamaan termasuk Al-Khairiyah.

Masyarakat miskin akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang karena kebutuhan yang mendesak, oleh karenanya akan melakukan apapun untuk mencapai hal tersebut termasuk praktik syirik dan meninggalkan ajaran agama. Al-Khairiyah sebagai gerakan sosial melakukan usaha-usaha untuk membendung akses modernisasi dalam membantu masyarakat miskin khususnya agar tidak jatuh ke jurang kekafiran. Adanya gerakan-gerakan di bidang ekonomi, politik, dan budaya yang gencar dikembangkan Al-Khairiyah kiranya menjadi sebuah masalah penelitian yang menarik termasuk sejarah Al-Khairiyah yang telah menjadi pusat perkembangan pemikiran pada awal pendiriannya dan

memberi kontribusi memunculkan ide sinkronisasi gerakan sosial di masa lalu dan sekarang.

Gerakan sosial Al-Khairiyah yang pernah mati suri kini menjadi fenomena dalam format baru. Gerakannya sekarang lebih pada memunculkan ide atau gagasan untuk membantu warga Al-Khairiyah yang kurang mampu secara ekonomi, mulai mengembangkan ekonomi warga dengan membuat sebuah Al-Khairiyah (AK) Mart dengan harga khusus bagi warga yang tidak mampu, Klinik Al-Khairiyah dengan daya tampung 20.000 BPJS khusus untuk warga Al-Khairiyah yang kurang mampu, pembentukan Brigade Al-Khairiyah untuk membela hak-hak warga Al-Khairiyah yang tertindas khususnya di lingkungan kerja. Hal ini bermakna bahwa Al-Khairiyah menginginkan warga terjamin kebutuhan dasarnya. Hal ini sejalan dengan system social yang mengedepankan keadilan dalam perspektif agama untuk melindungi manusia yang tertindas (Azizah 2019). Julranda, Effendi, and Zalukhu (2022) berpandangan bahwa paradigma ini perlu digunakan dalam Pembangunan hukum nasional dalam rancangan Masyarakat. Selain itu, perlindungan keselamatan kerja untuk pekerja di lingkungan Al-Khairiyah berupaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan meminimalisir risiko kecelakaan dan penyakit saat kerja (Pratiwi and Lemes 2021). Hal ini pun diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan matrabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ciri Khas Lembaga Pendidikan Al-Khairiyah

Setiap ajaran organisasi keagamaan memiliki aktivitas rutin yang di lakukan. Pada Al-Khairiyah, dilakukan kegiatan pengajian untuk warga Al-Khairiyah setiap sebulan sekali di lingkungan Al-Khairiyah, dengan cara mengundang para tokoh Al-Khairiyah dari seluruh pelosok negeri untuk menjadi pembicara secara bergiliran. Secara khusus ada pengajian para tokoh serta guru besar yang setiap hari rabu siang di lakukan secara rutin. Para ulama membahas kajian tafsir dan hadits secara komprehensif dan mendalam, demikian halnya dalam mengkaji alat, yaitu mengkaji kitab-kitab dalam rangka memperkuat pemahaman bahasa arab. Kegiatan pengajian tersebut secara lebih mendalam akan diobservasi lebih lanjut, mengingat pentingnya kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengukur eksistensi Al-Khairiyah pasca reformasi. Hal ini dapat kita amati sebagai cara untuk merawat organisasi dengan mempertahankan konsep-konsep berorganisasi, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kader organisasi, seperti yang dilakukan dalam penelitian Rochmawati (2021),

bahwa pelatihan ini dilakukan untuk menciptakan para kader-kader yang berkapasitas dan terlatih agar kemampuan pengetahuan dan keterampilan dapat tercipta.

Warga Al-Khairiyah adalah sebuah komunitas khusus yang dinisbatkan kepada seluruh masyarakat alumni Al-Khairiyah dari segi pendidikan formal serta masyarakat luas yang secara rutin mengikuti pengajian di lingkungan Al-Khairiyah. Interaksi sosial akan terlihat dengan jelas ketika warga Al-Khairiyah berkumpul dalam satu majelis dan berdiskusi tentang isu-isu kontemporer yang sedang berkembang di negeri ini. Secara umum interaksi antar warga, warga dengan Pengurus Besar, dan warga Al-Khairiyah dengan masyarakat umum dapat diamati dalam ruang-ruang pengajian di lingkungan Al-Khairiyah. Kita dapat melihat bahwa AL-Khairiyah berupaya mengembangkan diri dengan memperlus dakwah ke berbagai latar belakang Masyarakat. Rifa'i (2019) menyebutkan bahwa perlunya pengelolaan yang baik setidaknya memiliki asas perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan Pemantauan (POAC).

Lenski (dalam Tarwiyani 2016) mengelompokkan konsep tentang masyarakat ke dalam dua kategori, yaitu masyarakat geografis dan masyarakat kultural. Warga Al-Khairiyah jika ditinjau dengan teori tersebut tergolong ke dalam masyarakat yang dipertimbangkan terkategori sebagai masyarakat kultural, karena tergolong sebagai masyarakat agamis yang memiliki kultur tersendiri, berbeda dengan masyarakat agamis lainnya. Sedangkan Teori Touraine lebih rinci menggolongkan masyarakat ke dalam empat tipe, yaitu agraris (antar pekerja dan tuan rumah), merkantilis (antar budak dan saudagar), industri (antar buruh dan pemodal), dan terprogram (lebih beragam dengan peran yang berbeda-beda). Masyarakat Cilegon dapat dikategorikan sebagai masyarakat industri karena hampir di setiap sudut kota di lingkari oleh perusahaan-perusahaan raksasa sehingga pertarungan antara buruh dan pemodal lebih sering terjadi sebagai pertentangan abadi.

Teori tafsir budaya simbolik akan diperkuat dengan teori atribusi dalam psikologi sosial. Fritz Heider menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dijelaskan penyebabnya dengan teori atribusi, baik yang disebabkan oleh keadaan internal seperti motif dan sikap atau keadaan eksternal. Jika seorang warga Al-Khairiyah melakukan tindakan mengkritik pemerintah secara internal dapat dikaji penyebabnya, antara lain memiliki sifat pemberontak dan memiliki keilmuan yang cukup. Secara eksternal dapat dimungkinkan karena kondisi lingkungan masyarakat yang memprihatinkan secara ekonomi atau pergaulan dengan kelompok garis keras. Seorang peneliti dapat mengatribusi suatu tindakan seseorang karena adanya daya personal yang dimiliki oleh orang-orang yang sedang diteliti yang memiliki kemampuan dalam bertindak, mempunyai niat dalam melakukan, dan berusaha untuk

menyelesaikan tindakan tersebut, sampai peneliti memiliki anggapan bahwa tindakan tersebut berhubungan dengan sifatnya atau karena adanya daya lingkungan. Menurut Heider (dalam Al-Sharif 2021) setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu.

E. KESIMPULAN

Al-Khairiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang terbesar dan tertua di daerah Banten yang memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan pendidikan Islam di tanah air. Bahkan sekarang ini Al-Khairiyah menjadi pusat jaringan madrasah (*madrsay network*) yang terbesar baik di banten maupun diluar Banten, seperti Cilegon, Serang, Tangerang, Lampung, Palembang, Jakarta dan Bekasi. Pada awal berdirinya, Al-Khairiyah merupakan lembaga pendidikan tradisonal Islam yang dikenal sebagai “pesantren Citangkil” seperti pondok pesantren lainnya, tradisi pendidikan Islam yang diselenggarakannya ketika itu mencakup lima elemen dasar yang pokok dalam tradisi pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, kiyai, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (*al-kutub almu'tabaroh*) yang disebut kitab kuning. Kurikulum pendidikannya mengkhususkan kepada pengajian ilmu agama (ulum ad-diin). Sedangkan sistem pembelajarannya ditekankan pada penangkapan harfiah atau satu kitab tertentu, yang dikenal dengan metode wetonan atau sorogan. Namun sejak tahun 1925, Al-khairiyah melakukan pembaruan dan pengembangan sistem pendidikan dipesantren dengan memasukan beberapa unsur dari sistem pendidikan modern. Khususnya sistem klasikal dan perjenjangan kedalam sistem pendidikan pesantren. Termasuk memasukan pelajaran-pelajaran umum selain pelajaranpelajaran agama Islam kedalam kurikulum pesantren. Selain itu, Al-Khairiyah mendirikan organisasi untuk menaungi cabang-cabang madrasah yang dibuka pada tahun 1929 agar eksistensi Al-Khairiyah dalam dunia pendidikan di Indonesia tetap berjalan meskipun para pendirinya sudah tidak ada.

F. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan pada Lembaga Pendidikan Al-Khairiyah yang telah bersedia menjadi mitra peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdurrahman. 2020. "Sejarah Pesantren Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 4 (1). <https://doi.org/10.35897/intaj.v4i1.388>.
- Abrori, M Sayyidul, and Moh. Solikul Hadi. 2020. "Integral Values in Madrasah: To Foster Community Trust in Education." *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam* 5 (2). <https://doi.org/10.24269/ijpi.v5i2.2736>.
- Aisyah, Siti. 2023. "Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)." *Journal of Islamic Education El Madani* 2 (1). <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i1.39>.
- Alfurqan. 2019. "Perkembangan Pesantren Dari Masa Ke Masa." *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 13.
- Al-Sharif, Rami. 2021. "Critical Realism and Attribution Theory in Qualitative Research." *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal* 16 (1). <https://doi.org/10.1108/QROM-04-2020-1919>.
- Anggrayani, Ani. 2021. "Modernisasi Pendidikan Islam Di Banten: Peran KH. Syam'un Dalam Membangun Pesantren Al-Khairiyah Citangkil Warnasari Cilegon 1916-1942." *Tsaqofah* 19 (02). <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v19i02.3619>.
- Anita, Anita, Mustaqim Hasan, Andi Warisno, M. Afif Anshori, and An An Andari. 2022. "Pesantren, Kepemimpinan Kiai, Dan Ajaran Tarekat Sebagai Potret Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4 (3).
- Arif, Mohammad. 2016. "Perkembangan Pesantren Di Era Teknologi." *Jurnal Pendidikan Islam* 28 (2). <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.550>.
- Aslan. 2016. "Pengembangan Kurikulum Ditinjau Dari Tingkat Kabupaten Sambas Pada Daerah Tertinggal Di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Timur." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 3 (1).
- Azizah, Dedeh. 2019. "Teologi Pembebasan Dalam Pendidikan Islam Perspektif Asghar Ali Engineer." *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 4 (1).
- Chandra, Pasmah. 2020. "Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Madrasah." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 3 (2).
- Darmadji, Ahmad. 2015. "Pengembangan Madrasah Berbasis Manajemen Mutu Total Untuk Meningkatkan Moral Bangsa." *El-Tarbawi* 8 (1). <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art1>.
- Darmawi. 2022. "Penerapan Strategi Belajar Aktif (ActiveE Learning Strategy) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam, Sosial Dan Keagamaan* 2 (2).
- Daulay, Haidar Putra. 2019. *Pendidikan Islam Di Indonesia Historis Dan Eksistensinya. Medan: Prenamedia Group.*

- Daulay, Muhammad Roihan. 2021. "Sejarah Madrasah Di Indonesia (Pendekatan Sejarah Dan Perkembangannya)." *FORUM PAEDAGOGIK* 12 (1). <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3611>.
- Defnaldi, Defnaldi, Yunani Yunani, Andi Warisno, An An Andari, and Afif Anshori. 2023. "The Evolution of Islamic Education Institutions in Indonesia." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 8 (1). <https://doi.org/10.31851/jmksp.v8i1.10941>.
- Faiqoh, Dwi. 2019. "Supervisi Kepala Madrasah Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru." *Jurnal Kependidikan* 7 (1). <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.1938>.
- Farabi, Mohammad Al. 2020. "MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: Kasus Adabiyah School." *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 1 (3). <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i3.7838>.
- Fathorrahman. 2017. "Problematika Dualisme Ideologi Dan Kelembagaan Pendidikan Islam." *KABILAH: Journal of Social Community* 2 (1). <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i1.3092>.
- Febriani, Febriani, Rehani Rehani, and Muhammad Zalnur. 2022. "Proses Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ramayulis." *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2). <https://doi.org/10.56874/eduglobal.v3i2.988>.
- Fikriah. 2019. "Peran Strategis Pengawas Dalam Penjaminan Mutu Madrasah." *Semdi Unaya*- desember (2).
- Haedar Nashir. 2015. *Muhammadiyah a Reform Movement*. Muhammadiyah University Press. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hairullah, Hairullah. 2023. "Reformasi Pendidikan Islam Di Madrasah Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Abad 21 : Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Widya Borneo* 6 (1). <https://doi.org/10.56266/widyaborneo.v6i1.164>.
- Hasibuan, Zainal Efendi. 2016. "The Portrait of Surau as a Forerunner of Madrasah: The Dynamics of Islamic Institutions in Minangkabau Toward Modernization." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 1 (1).
- Hidajati, Fitriyah, Desy Wulandari, Abdul Kholiq, and Choirul Mahfud. 2019. "Madrasah Dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 6 (1). <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i1.115>.
- Hidayat, Yayat, Hadiat, Mohamad Yudianto, and Peri Ramdani. 2022. "Tantangan Pesantren Salaf Dan Khalaf Di Era Global." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (1).
- Imam, Mashur, and Moh. Hamzah. 2023. "Problematika Dan Konsepsi Kemandirian Pesantren Salaf." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 4 (1). <https://doi.org/10.54471/njis.2023.4.1.32-47>.
- Irfan, Z A, M Muslim, and M F Hidayatullah. 2022. "Peran Penting Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Kedisiplinan Siswa Di SMAN 9 Malang." ... : *Jurnal Ilmiah Keagamaan*.
- Irwin Hidayat. 2019. "Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan." *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* Volume 11 (2 issues per year (June & December)).

- Ismail. 2014. "Konsep Pendidikan KH. Ahmad Dahlan (Studi Tentang Filosofi Pendidikan, Tujuan Pendidikan, Model Pendidikan, Dan Pembaharuan Pendidikan)." *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 6 (1).
- Jono, Muhamad, Firman, and Rusdinal. 2019. "Peranan Prof. Dr. H. Ramayulis Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Sumatera Barat 1945-2015." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3 (6).
- Julranda, Rizky, Sultan Fadillah Effendi, and Michael Ariel Perdana Zalukhu. 2022. "PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT." *CREPIDO* 4 (2). <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>.
- Karo, Tiy Kusmarrabbi. 2020. "Modernisasi Pendidikan Islam Di Mesir." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2 (2). <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i2.60>.
- Lalu Abdurrahman Wahid. 2022. "Pendidikan Islam Transformatif Perspektif Azyumardi Azra (Pemikiran Modernisasi Dan Rekonstruksi Pendidikan Islam)." *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (3). <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v1i3.25>.
- Luthfiyani, Anis, and Muhammad Sirozi. 2023. "Politik Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Orde Lama." *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 10 (1).
- Madarik, Muhammad. 2018. "Manajemen Madrasah Dalam Perspektif Islam." *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 2 (1). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v2i1.25>.
- Magdalena, Zulfah. 2022. "Personality And Visionary Leadership Sebagai Tonggak Meningkatkan Kualitas Madrasah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16 (3). <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1029>.
- Malfi, Febri, Sudirman, Zulmuqim, and Duski Samad. 2023. "Kebangkitan Dan Perkembangan Madrasah Di Indonesia." *Arus Jurnal Pendidikan* 3 (1). <https://doi.org/10.57250/ajup.v3i1.190>.
- Mariana, Dielfi, and Achmad Mahrus Helmi. 2022. "Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (1).
- Mas'ulah, Siti. 2019. "Pesantren Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia." *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam* 18 (1). <https://doi.org/10.29300/attalim.v18i1.1613>.
- Misini, Misini, Zainal Abidin, Andi Warisno, An An Andari, and M Afif Anshori. 2023. "Planning Management Implementation to Improve Graduate Quality." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 8 (1). <https://doi.org/10.31851/jmksp.v8i1.10998>.
- Murtadlo, Muhamad. 2016. "Strategi Pembiayaan Pendidikan Pada Madrasah Swasta Unggulan." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 14 (1). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i1.14>.
- . 2018. "Hubungan Mesir-Indonesia Dalam Modernisasi Pendidikan Islam." *Al-Qalam* 24 (2). <https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.530>.
- Na'im, Zaedun. 2021. "Sejarah Perkembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam." *Journal Evaluasi* 5 (1). <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.569>.
- Perdana, Indra, and Joni Bungai. 2020. "Model Kepemimpinan Dayak Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah." *Equity In Education Journal* 2 (2). <https://doi.org/10.37304/ej.v2i2.1674>.

- Permana, Rahayu, and Fahmi Hidayat. 2018. "Kesepakatan PB Al-Khairiyah Cilegon Dengan PT. Krakatau Steel Tahun 1974-1978." *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah* 3 (1).
- Pratiwi, Ketut Wahyu, and I Nyoman Lemes. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PROPERTY DI PT. GRAHA ADI JAYA SINGARAJA." *Kertha Widya* 8 (1). <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.637>.
- Rahmat. 2014. "Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sistem Dan Perkembangannya Sebelum Dan Sesudah Kemerdekaan)." *Rihlah Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 1 (01).
- Rifa'i, Muh. Khoirul. 2019. "Pengelolaan Majelis Taklim Dan Pengajian Umum." *Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 4 (1). <https://doi.org/10.21154/ibriez.v4i1.60>.
- Rochmawati, Erna. 2021. "PENINGKATAN KAPASITAS KADER MUHAMMADIYAH DALAM PENANGANAN GEJALA PADA LANSIA DENGAN PENYAKIT KRONIK." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/ppm.32.202>.
- Rohman, Fatkhur. 2017. "Pendidikan Islam: Menguak Sejarah Perkembangan Madrasah Hingga Era Nizamiyah." *Jurnal Pendidikan Islam Dan Teknologi Pendidikan* VII (2).
- Rohmat. 2019. "Pendidikan Pesantren Salaf." *Tawadhu* 3 (2).
- Ruslan, Ahmad. 2020. "Falsafah Ajaran Kyai Ahmad Dahlan Dan Etos Pendidikan Muhammadiyah." *CHRONOLOGIA* 2 (1). <https://doi.org/10.22236/jhe.v2i1.5620>.
- Samudera, Sahara Adjie. 2023. "Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019)." *Fahima* 2 (2). <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>.
- Sinaga, Sopian. 2020. "Modernisasi Pendidikan Islam Landasan Teologis-Filosofis-Historis." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4 (1). <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i1.78>.
- Sukhoiri, Sukhoiri. 2018. "Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Sebelum Madrasah." *Qathrunâ Jurnal Keilmuan Dan Pendidikan* 5 (1).
- Susilo, Agus Agus, and Ratna Wulansari. 2020. "Sejarah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 20 (2). <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6676>.
- Syamsuddin, Fachri. 2004. "Pembaharuan Islam Di Minangkabau Awal Abad XX: Studi Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Abdullah Ahmad, Dan Syekh Abdul Karim Amrullah." *Disertasi*.
- Syukri, Muhammad, and Zaenal Abidin. 2019. "STRATEGI KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN DARUN NAJAH DUMAN DALAM MENINGKATKAN RELIGIUSITAS MASYARAKAT DI DESA DUMAN KEC. LINGSAR KAB. LOMBOK BARAT." *KOMUNIKE* 11 (2). <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i2.2287>.
- Tarwiyani, Tri. 2016. "TEKNOLOGI DAN TIPE MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF GERHARD E. LENSKE, Sebuah Tinjauan Filsafat Sejarah."

HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah 1 (1).
<https://doi.org/10.33373/his.v1i1.388>.

Umar, Surip. 2023. "Manajemen Entitas Untuk Perkembangan Pondok Pesantren Di Era Society 5.0." *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education* 4 (1).
<https://doi.org/10.55380/tarbawi.v4i1.304>.

Usman. 2017. "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL; Tinjauan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Madania* 7 (1): 241–61.

Wiryono, Herry. 2012. "Perkembangan Perguruan Islam Al-Khairiyah Cilegon Banten (1916-1950)." *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 4 (1).
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v4i1.123>.